



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TANGGAL 6 – 8 NOVEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 6 November 2024, yang dipimpin oleh Wakil Komisi II DPR RI Bapak Bahtra S.PWK. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan di kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh PJ Gubernur Sultra, KPU Provinsi Sultra Bawaslu Provinsi Sultra, Kejaksaan, Polda Provinsi Sultra. Dalam kegiatan rapat tersebut, juga didampingi oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI.

Tujuan kunjungan kerja spesifik tersebut adalah untuk mendapatkan informasi, mendengar aspirasi, dan melihat langsung persiapan dan kesiapan kerja KPU-Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kesiapan dan persiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional 2024 berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU. Disamping itu juga ingin mendapatkan gambaran secara utuh terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu dalam upaya menyukseskan agenda besar nasional.

Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional merupakan perhelatan demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia yang diikuti 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, oleh karena itu meminta stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024 berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi kerawanan pada pilkada serentak tahun 2024 yaitu: pelanggaran netralitas ASN, politik uang, isu SARA, hoax, dan lain-lain. Penyelenggara Pemilu harus bisa menjaga profesionalitas, integritas, dan independensi agar Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 berjalan sesuai prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

PJ Gubernur Provinsi Sultra, dalam paparannya berkomitmen menjaga netralitas ASN dan mendukung pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, dimulai dari anggaran, keamanan, distribusi logistik sampai pada sosialisasi pilkada ke masyarakat. Sementara KPU Provinsi Sultra dan Bawaslu Provinsi Sultra

menyampaikan seluruh tahapan pilkada sampai saat ini berjalan dengan lancar dan aman.

Beberapa catatan hasil rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Penyelenggara Pemilu tentang Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, antara lain adalah:

1. Tim kunjungan Komisi II DPR RI mengapresiasi persiapan dan kesiapan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara, kerjasama antara Pemrov, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, bersama POLRI dan TNI diharapkan dapat mengantarkan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik dan aman
2. Komisi II DPR RI mengharapkan agar pelaksanaan pilkada serentak nasional di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat yang sudah dicapai pada pemilu serentak tahun 2024 sebesar 83, 82%, jika perlu lebih ditingkatkan lagi.
3. Perlunya menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak dengan pengawasan ketat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, serta memberikan sanksi bagi ASN, termasuk Pejabat Pemerintah Daerah yang melanggar netralitas dan peraturan perundang – undangan tentang Pilkada di setiap tahapan.
4. Komisi II DPR RI menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara agar membuat help desk yang berfungsi sebagai pusat informasi terkait Pilkada Serentak dan menerima berbagai keluhan dan laporan pelanggaran dari masyarakat.
5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara harus transparan dalam penanganan kasus, termasuk memberi informasi kepada masyarakat jika ada perkara yang dihentikan.

Kendari, 6 November 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara.